

**IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TERHADAP HAK ASUH ANAK OLEH ORANG TUA YANG
BERCERAI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Oleh

**Made Dian Maharani, NIM 2014101051
Program Studi Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Perceraian memberikan bermacam dampak hukum beberapaanya ialah hukum pada anak, harta bersama, dan lain sebagainya. Saat ini, kerap terjadi perceraian yang mengakibatkan permasalahan dalam penentuan hak asuh anak. Adanya dua tujuan permasalahan ini perlu diperhatikan, tujuan pertama yakni memperoleh informasi implementasi Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan tujuan kedua untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri Singaraja jika ada pelanggaran terhadap hak asuh anak. Penelitian dilakukan memanfaatkan jenis penelitian hukum empiris dengan memiliki sifat deskriptif. Dalam menentukan sampel penelitian melalui teknik *Non Probability Sampling* dengan *Purposive Sampling* sebagai bentuk penentuannya. Perolehan data selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran secara fakta tentang masalah penelitian. Adapun perolehan hasilnya yakni : (1) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap orang tua yang bercerai terlaksana karena peran orang tua untuk mendidik dan menjaga anaknya walaupun bercerai itu sudah menjadi kewajiban mereka dan didalam menentukan hak asuh, majelis hakim tetap memperhatikan bagaimana peran hukum yang ada, fakta di lingkungan dan juga kenyamanan anak atau pilihan anak. (2) Akibat hukum terhadap pelanggaran hak asuh anak yang telah *incharact* akan ditindak seperti pencabutan hak asuh anak, dan jika terjadi perselisihan terhadap hak asuh, penelantaran dan sampai kekerasan maka akan dikenakan tindak pidana.

Kata Kunci: Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hak Asuh Anak, Orang Tua, Bercerai

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 45 OF LAW NUMBER 16 OF 2019
REGARDING CHILD CUSTODY RIGHTS BY DIVORCE PARENTS IN THE
SINGARAJA STATE COURT**

By

Made Dian Maharani, NIM 2014101051

Legal Studies Program

ABSTRACT

Divorce causes various legal consequences, including for children, joint property, and others. Currently, divorce often occurs which results in problems in determining child custody. There are 2 (two) objectives for conducting this research, the first objective is to find out the implementation of Article 4 of the Marriage Law Number 16 of 2019. Meanwhile, the second objective is to find out what the role of the Singaraja District Court is if there is a violation of child custody rights. The sort of exploration utilized in this examination is descriptive empirical legal examination. The examination test assurance method involved was the Non Probability Sampling Technique as Purposive Sampling. This data obtained was then analyzed descriptively qualitatively, that is, it clearly describes the research problem. The results of the research obtained are that: (1) Article 45 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage at the Singaraja District Court for divorced parents is implemented because the role of parents to educate and look after their children even though they are divorced is their obligation and in determining custody rights, the panel of judges still pay attention to the role of existing law, facts in the environment and also the child's comfort or child's choice. (2) The legal consequences of violations of child custody rights that have been incarcerated will be dealt with such as revocation of child custody rights, and if there is a dispute over custody rights, neglect and even violence then a criminal offense will be imposed.

Keywords: *Law Number 16 of 2019, Child Custody, Parent, Divorce*